

Nomor : S-662/MK.08/2025 20 Oktober 2025

Sifat : Segera

Lampiran :

Hal : Percepatan Pelaksanaan Belanja APBD Tahun Anggaran 2025

Yth. Saudara Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia

## Dengan hormat,

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan program pembangunan tahun 2025, dan sejalan dengan arahan Presiden, perlu terus dilakukan langkah-langkah penguatan, baik oleh Pusat maupun Daerah. Terkait dengan hal tersebut, dari pemantauan dan evaluasi yang dilakukan di Pusat, kami meminta agar juga dilakukan langkah penguatan secara harmonis di Daerah.

Dari pemantauan yang dilakukan sampai dengan September 2025, dana transfer ke daerah (TKD) telah disalurkan sebesar Rp644,8 Triliun atau 74 persen dari pagu. Sejalan dengan realisasi TKD yang sudah cukup tinggi tersebut, kami mencatat realisasi belanja daerah dalam APBD 2025 secara total mengalami penurunan dibandingkan dengan realisasi belanja APBD tahun yang lalu, sehingga menyebabkan simpanan dana Pemda di perbankan sampai dengan Triwulan III 2025 mengalami kenaikan.

Sehubungan dengan pemantauan tersebut, serta untuk mendorong perekonomian nasional tahun 2025 agar bisa lebih baik, kami meminta Pimpinan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota untuk melakukan langkah-langkah penguatan sebagai berikut :

- Melakukan percepatan penyerapan belanja daerah secara efisien dan efektif dengan tata kelola yang baik.
- 2. Pemenuhan belanja kewajiban pada pihak ketiga yang menjalankan proyek-proyek pemerintah daerah (Pemda).
- 3. Memanfaatkan dana simpanan Pemda di perbankan untuk belanja program dan proyek di daerah.
- 4. Melakukan monitoring secara berkala (mingguan/bulanan) terhadap pelaksanaan belanja APBD dan pengelolaan dana Pemda di perbankan sampai dengan akhir tahun 2025, untuk menjadi evaluasi perbaikan di tahun 2026 agar sejalan dengan arah program pembangunan nasional yang telah ditetapkan Presiden.



2

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan bersama secara konsisten. Terima kasih kami sampaikan atas perhatian dan sinergi berkelanjutan yang terjalin antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Menteri Keuangan



Ditandatangani secara elektronik

Purbaya Yudhi Sadewa

## Tembusan:

- 1. Presiden Republik Indonesia
- 2. Menteri Dalam Negeri
- 3. Menteri Sekretaris Negara
- 4. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
- 5. Direktur Jenderal Perbendaharaan

GEDUNG DJUANDA I LANTAI 3, JALAN DR. WAHIDIN RAYA NOMOR 1 JAKARTA 10710, KOTAK POS 21 TELEPON (021) 3449230, FAKSIMILE (021) 3453710, LAMAN www.kemenkeu.go.id

